

**DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN:
STUDI EMPIRIS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun oleh:
Heni Wijayanti
NIM: 31402400036**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN: STUDI EMPIRIS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh:
Heni Wijayanti
NIM: 31402400036

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Agustus 2025

Ketua Program Studi,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak.,

CA., IFP., AWP., PhD

NIK. 211403012

Dosen Pembimbing,

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si.,

Ak., CA

NIK. 211402010

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heni Wijayanti
NIM : 31402400036
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN: STUDI
EMPIRIS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 18 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Heni Wijayanti
NIM. 31402300067

ABSTRAK

Studi ini dilaksanakan dengan maksud untuk menguji pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, serta kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap kualitas penyajian informasi keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah. Kualitas laporan keuangan diproksikan melalui opini audit yang diterbitkan oleh badan audit independent yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan metode analisis yang digunakan berupa regresi logistik biner. Sampel penelitian meliputi 35 pemerintah kabupaten dan kota selama periode 2015–2023, sehingga menghasilkan total 308 unit observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal dan kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif signifikan pada kualitas pelaporan keuangan, sedangkan variabel ukuran pemerintah, kemandirian fiskal, status administratif, dan pengalaman kepala daerah tidak memberikan pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal dan penguatan fungsi pengawasan internal dalam mendorong akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akuntansi sektor publik, sementara secara praktis memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah.

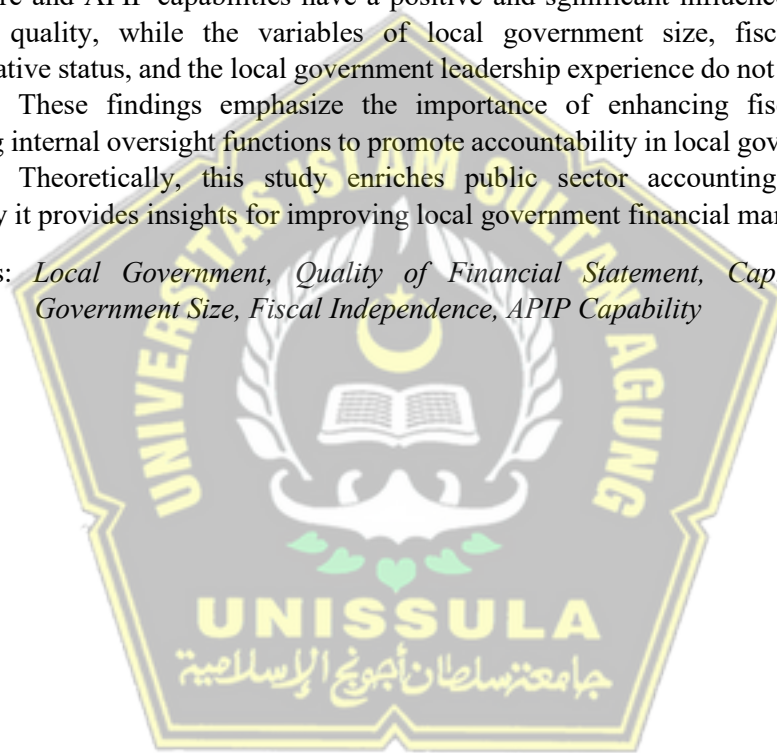
Kata Kunci: *Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Kemandirian Fiskal, Kapabilitas APIP*



ABSTRACT

This study was conducted to assess the impact of capital expenditure, local government size, fiscal independence, administrative status, local government leadership experience, and the capabilities of the Internal Government Supervisory Agency (APIP) on the local government financial reporting quality in Central Java. Financial reporting quality is proxied by audit opinions issued by the State Audit Agency (BPK), with the analytical method employed being binary logistic regression. The research sample included 35 regencies and cities during the period 2015–2023, resulting in a total of 308 observations. The analysis indicates that capital expenditure and APIP capabilities have a positive and significant influence on the financial reporting quality, while the variables of local government size, fiscal independence, administrative status, and the local government leadership experience do not have a significant influence. These findings emphasize the importance of enhancing fiscal capacity and enhancing internal oversight functions to promote accountability in local government financial reporting. Theoretically, this study enriches public sector accounting research, while practically it provides insights for improving local government financial management.

Keywords: *Local Government, Quality of Financial Statement, Capital Expenditure, Government Size, Fiscal Independence, APIP Capability*



INTISARI

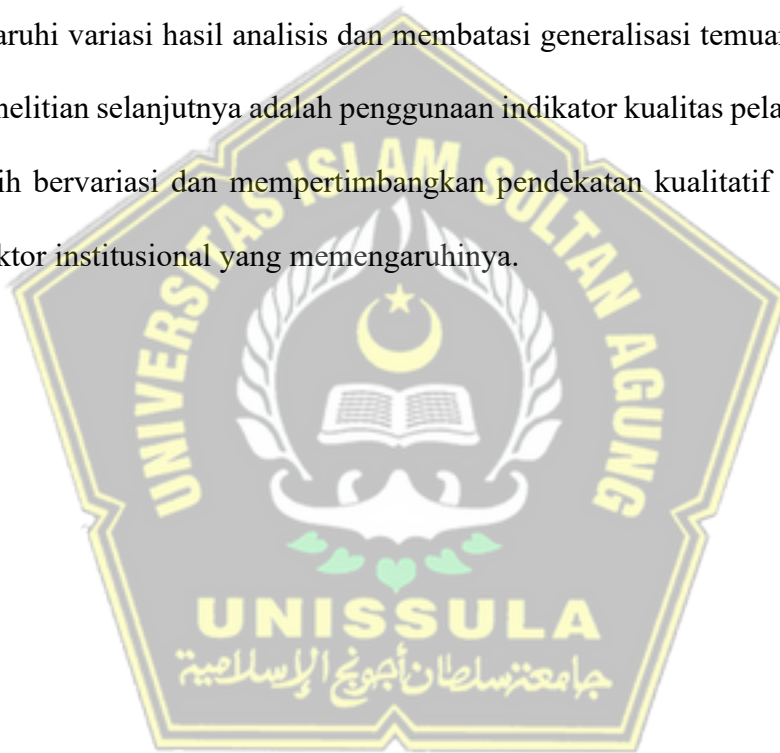
Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, dan kapabilitas APIP pada kualitas penyajian informasi keuangan pada pemerintah daerah. Opini audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digunakan sebagai proksi dari kualitas pelaporan keuangan. **Teori stewardship** dijadikan sebagai teori utama dalam penelitian ini, menguraikan bahwa kepala daerah sebagai pengelola sumber daya publik akan bertindak untuk kepentingan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

Pada penelitian ini, penulis menguji beberapa hipotesis diantaranya: 1) belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan; 2) ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan; 3) kemandirian fiskal memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan; 4) status administratif berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah; 5) pengalaman kepala daerah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan; serta 6) kapabilitas APIP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pendekatan yang dipilih untuk studi ini adalah regresi logistik. Sampel penelitian mencakup 35 pemerintah daerah di Jawa Tengah selama tahun 2015 s.d. 2023, dengan jumlah 308 observasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa besarnya nilai belanja modal dan kapabilitas APIP dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian informasi keuangan. Sedangkan, ukuran pemerintah, kemandirian

fiskal, status administratif, dan pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh signifikan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada distribusi data variabel dependen yang cenderung tidak seimbang, karena sebagian besar pemerintah daerah dalam sampel memperoleh opini WTP. Dominasi opini yang terjadi pada penelitian ini dapat memengaruhi variasi hasil analisis dan membatasi generalisasi temuan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan indikator kualitas pelaporan keuangan yang lebih bervariasi dan mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor-faktor institusional yang memengaruhinya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan banyak nikmat, hidayah, dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan: Studi Empiris Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”** dapat diselesaikan tepat waktu.

Skripsi ini dilakukan dengan tujuan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi S1 dengan gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyelesaian skripsi ini tentunya tak luput dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., PhD. sebagai Kepala Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan mengarahkan, dan memberi motivasi hingga selesainya penyusunan skripsi ini,

4. Bapak Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak. sebagai dosen reviewer yang berkenan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini,
5. Seluruh tim dosen dan sivitas akademika FE Unissula yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini hingga selesai,
6. Keluarga dan sahabat tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan yang tulus.

Penulis menyadari bahwa masih adanya keterbatasan dan kekurangan, sehingga menimbulkan belum sempurnanya penulisan Skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya masukan serta saran yang membangun dari pembaca. Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi serta mampu memperkaya pengetahuan pembaca.

Semarang, 18 Mei 2025

Penulis,



Heni Wijayanti

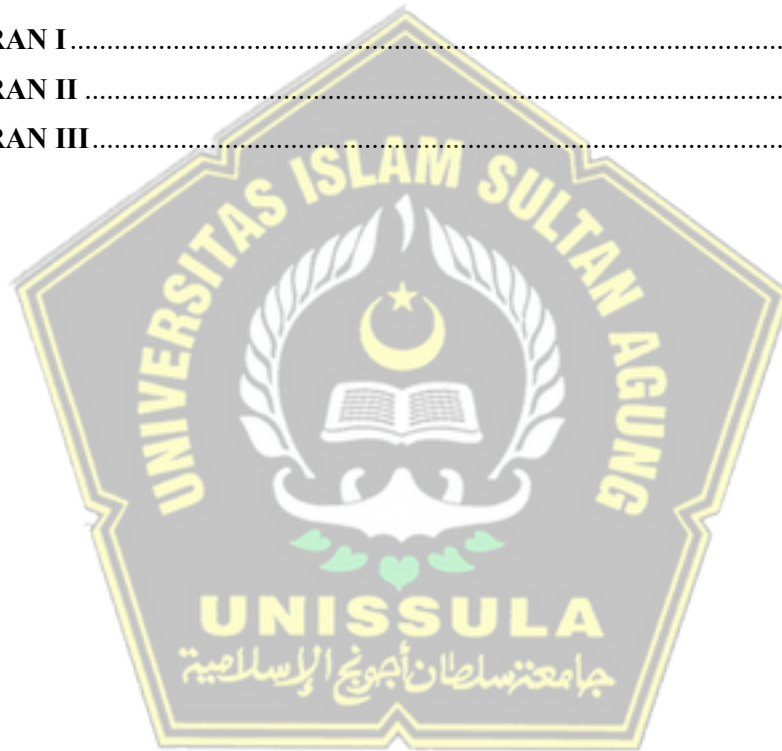
NIM. 31402400036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
INTISARI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Teori Stewardship	10
2.1.2 Kualitas Pelaporan Keuangan.....	11
2.1.3 Belanja Modal (Capital Expenditure).....	12
2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah (Local Government Size)	13
2.1.5 Kemandirian daerah Daerah (Financial Independence).....	14
2.1.6 Status Pemerintah Daerah (Local Government Status).....	16
2.1.7 Pengalaman Kepala Daerah dan Kapabilitas APIP.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	23
2.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	23
2.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan....	25

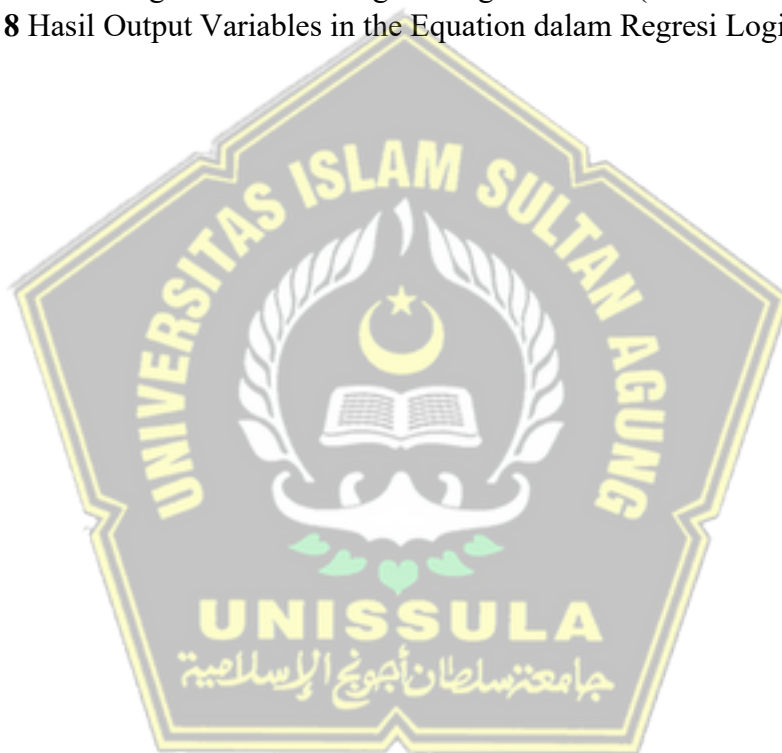
2.3.3 Pengaruh Kemandirian daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	26
2.3.4 Pengaruh Status Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	28
2.3.5 Pengaruh Pengalaman Kepala Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan ...	29
2.3.6 Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	30
2.4 Kerangka Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Populasi dan Sampel	32
3.2.1 Populasi.....	32
3.2.2 Sampel	33
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5 Variabel dan Indikator	35
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	36
3.5.2 Variabel Independen (X).....	36
3.6. Teknik Analisis Data.....	40
3.6.1 Statistik Deskriptif	40
3.6.2 Uji Asumsi Klasik: Multikolinearitas	41
3.6.3 Deteksi Outlier.....	42
3.6.4 Analisis Regresi Logistik Biner.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2 Analisis Data.....	47
4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	47
4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
4.2.3. Hasil Deteksi Outlier.....	51
4.2.4 Hasil Regresi Logistik Biner.....	52
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	56
4.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	56
4.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan....	58
4.3.3 Pengaruh Kemandirian daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	59
4.3.4 Pengaruh Status Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	60

4.3.5 Pengaruh Pengalaman Kepala Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	62
4.3.6 Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Implikasi.....	66
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	67
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN I.....	74
LAMPIRAN II	75
LAMPIRAN III.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Opini Audit Tahun 2015-2023	47
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif	48
Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4. 4 Tabel Outlier.....	51
Tabel 4. 5 Uji Kecocokan Model Hosmer dan Lemeshow Regresi Logistik Biner ...	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Omnibus Terhadap Model Regresi Logistik Biner.....	53
Tabel 4. 7 Hasil Ringkasan Model Regresi Logistik Biner (Model Summary)	54
Tabel 4. 8 Hasil Output Variables in the Equation dalam Regresi Logistik Biner	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Kerangka Penelitian.....	31
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta membangun kredibilitas pemerintah di mata publik. Laporan keuangan berperan strategis sebagai alat pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih tepat. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Kurniati et al., 2024). Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelaporan, yaitu mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya penyajian informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Indikator yang umumnya digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah opini audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula (Patria & Sasmita, 2021).

Opini audit mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu: kepatuhan terhadap SAP, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (BPK RI, 2023). Di Provinsi Jawa Tengah, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami tren peningkatan yang dari 88,57% pada tahun 2017 menjadi 94,29% pada tahun 2023, meskipun selama periode tersebut terjadi disrupsi besar akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada struktur belanja daerah dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (BPK RI, 2023; BPS Jawa Tengah, 2022)

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut meliputi belanja modal, ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah serta peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam dan belum menunjukkan konsistensi. Penelitian Firmansyah, et al. (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, sedangkan Aurelia et al. (2024) justru menemukan pengaruh negatif. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih terfokus pada sektor swasta atau BUMN (Digdowiseiso et al., 2022; Djamil Nasrullah, 2023) sementara studi yang membahas sektor publik, khususnya pemerintah daerah, masih relatif terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian (*research gap*)

mengingat pengelolaan keuangan sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor privat, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, maupun mekanisme penganggaran.

Dalam perkembangan lebih lanjut, perhatian terhadap kapabilitas APIP sebagai faktor determinan kualitas pelaporan keuangan semakin meningkat. Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016, kapabilitas APIP mencerminkan kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern secara profesional, efektif, dan independen. Semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP, maka semakin efektif pula peran pengawasan internal dalam mendeteksi, mencegah, serta memperbaiki penyimpangan pengelolaan keuangan (Peraturan Kepala BPKP, 2016). Penelitian Purnamawati & Hatane (2020) menunjukkan bahwa peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sementara penelitian Fajri & Ritonga (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kapabilitas APIP dengan kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang menelaah peran APIP dalam konteks pemerintah daerah dengan mempertimbangkan tingkat kapabilitas yang berbeda-beda.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat adanya kebutuhan untuk memahami faktor-faktor determinan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah secara lebih menyeluruh dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis melalui pengujian terhadap variabel-variabel yang belum banyak diuji secara simultan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi

pembuat kebijakan di tingkat daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, pemahaman terhadap dinamika kualitas pelaporan diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penguatan sistem pelaporan keuangan daerah yang adaptif terhadap kondisi krisis, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokus penelitian dilatarbelakangi oleh entitas pemerintah yang merepresentasikan keberagaman karakteristik fiskal, administratif, dan tingkat kapabilitas APIP. Jawa Tengah juga memiliki catatan perkembangan opini audit yang menarik untuk dianalisis secara lebih dalam terutama dalam konteks adaptasi terhadap tantangan pandemi dan pengelolaan keuangan daerah pasca-krisis.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ada beberapa perbedaan penting yang terdapat dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini menggunakan kombinasi variabel yang lebih komprehensif, yaitu belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, serta kapabilitas APIP, yang belum banyak diteliti secara bersamaan dalam satu model analisis. Kedua, penelitian ini secara khusus menggunakan data longitudinal selama tahun 2015 sampai dengan 2023 yang mencakup periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, sehingga mampu memberikan gambaran dinamika yang lebih utuh. Ketiga, fokus

penelitian ini diarahkan secara khusus pada sektor pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang belum banyak disoroti secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Terakhir, penelitian ini juga memberikan penekanan pada peran kapabilitas APIP sebagai faktor penting dalam sistem pengendalian intern yang akan memperjelas temuan-temuan terdahulu. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap kajian kualitas pelaporan keuangan di sektor publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diangkat untuk mengkaji secara komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah serta memberikan kontribusi terhadap penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik dengan judul: **“Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan: Studi Empiris Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah”**. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian terdahulu, tetapi juga untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena empirik dan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, ditemukan adanya permasalahan berupa ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh variabel

belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, dan kapabilitas APIP telah banyak diidentifikasi sebagai faktor esensial dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Namun di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel tersebut secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kontradiksi dalam literatur. Dengan demikian, rumusan masalah dalam dapat dinyatakan sebagai berikut: *“Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah?”*

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah status pemerintah daerah (kabupaten/kota) mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

5. Apakah pengalaman pemimpin berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah kapabilitas aparat pengendali internal (APIP) berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh belanja modal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguji pengaruh kemandirian daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Menguji pengaruh status pemerintah daerah (kabupaten atau kota) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5. Menguji pengaruh pengalaman pemimpin yang diukur berdasarkan jumlah tahun kepemimpinan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
6. Menguji pengaruh kapabilitas APIP sebagai unsur pengendalian internal instansi pemerintah terhadap tingkat kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

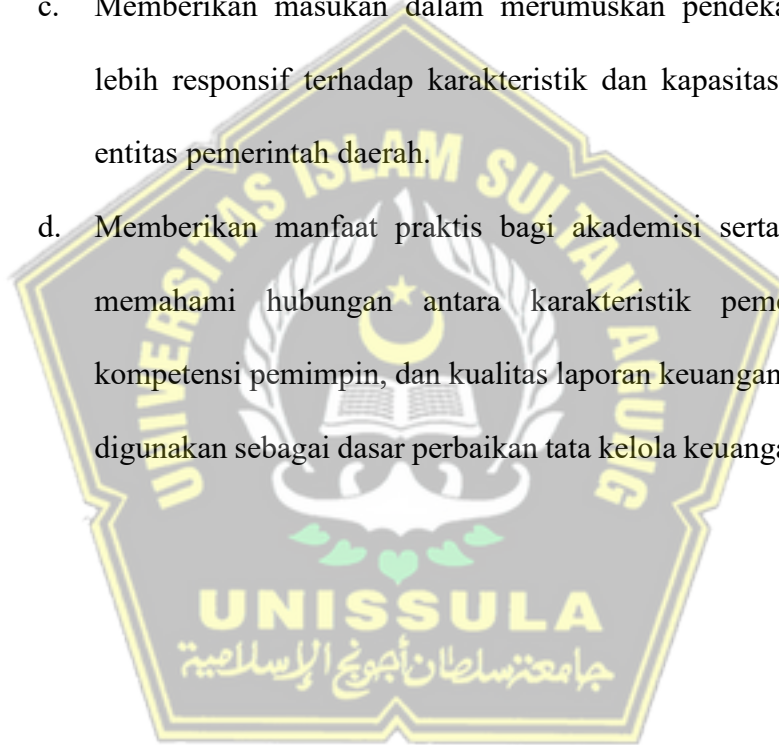
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan mengkaji variabel-variabel seperti belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, dan kapabilitas APIP dalam satu model penelitian, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris yang masih terbatas dan belum konsisten di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dengan cakupan wilayah atau pendekatan metodologi yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi khususnya kepada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah baik kabupaten maupun kota mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

- b. Menyediakan informasi bagi penyusun kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, terkait beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pengelolaan belanja modal, optimalisasi kemandirian daerah, dan pemilihan pemimpin yang memiliki pengalaman dan kompetensi.
- c. Memberikan masukan dalam merumuskan pendekatan audit yang lebih responsif terhadap karakteristik dan kapasitas masing-masing entitas pemerintah daerah.
- d. Memberikan manfaat praktis bagi akademisi serta praktisi dalam memahami hubungan antara karakteristik pemerintah daerah, kompetensi pemimpin, dan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan sektor publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship merupakan salah satu pendekatan teoritis yang bertujuan memahami perilaku pemimpin dalam organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan daerah. Teori ini menyatakan bahwa manajer atau pemimpin organisasi bertindak sebagai steward, yaitu individu yang memprioritaskan kepentingan organisasi atau publik di atas kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks ini, pemimpin dianggap memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan organisasi, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

Teori ini berbeda dengan teori keagenan (*agency theory*), yang mengasumsikan bahwa pemimpin cenderung bertindak oportunistik dan memerlukan mekanisme pengawasan. Dalam teori stewardship, pemimpin justru dipandang sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk mengelola sumber daya dengan baik demi kepentingan bersama. Menurut (Donaldson & Davis, 1991), kondisi ini dapat tercapai apabila terdapat konsistensi tujuan antara pemimpin dan organisasi serta ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Teori stewardship digunakan untuk menjelaskan bagaimana determinan tertentu, seperti belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, status pemerintah daerah, pengalaman pemimpin serta kapabilitas APIP dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan yang baik mencerminkan bagaimana pemimpin sebagai steward berhasil melaksanakan tanggung jawabnya dalam tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

2.1.2 Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Kualitas laporan keuangan pemerintahan wajib memenuhi standar akuntansi yang berlaku serta dapat memberikan informasi yang lebih akurat serta tepat waktu mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah (PP Nomor 71 Tahun 2010). Laporan keuangan yang berkualitas juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat dan pihak terkait. Teori yang mendasari kualitas laporan keuangan pemerintah berfokus pada prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mengacu pada kemudahan akses terhadap informasi yang akurat, sementara akuntabilitas mengarah pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti sistem pengendalian internal, tetapi juga faktor eksternal, seperti regulasi dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.

2.1.3 Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Belanja modal sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Secara teoritis, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP Nomor 12 Tahun 2019). Belanja modal meliputi belanja yang dilakukan meliputi pengadaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Dalam konteks pelaporan keuangan, pengelolaan belanja modal yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencatat dan melaporkan aset tetap secara akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengukuran belanja modal dapat dilakukan dengan menggunakan indikator rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah, sebagaimana digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu (Aurelia et al., 2024). Rasio ini mencerminkan proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang diporsikan untuk investasi dalam aset tetap. Formulasi yang digunakan dinyatakan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio belanja modal, semakin tinggi pula investasi pemerintah daerah dalam pengadaan aset tetap. Namun, rasio belanja modal yang tinggi tidak selalu mencerminkan kualitas pengelolaan aset jika tidak disertai dengan pencatatan yang akurat dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa belanja modal tidak hanya dialokasikan secara optimal, tetapi juga dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah (*Local Government Size*)

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana cakupan atau skala dari suatu entitas tertentu yang dapat direpresentasikan melalui total aset pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah ukuran pemerintah daerah (*local government size*). Semakin besar ukuran pemerintah

menunjukkan kapasitas keuangan yang lebih besar pula. Pemerintah daerah dengan anggaran atau aset yang besar diharapkan memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten, teknologi informasi yang lebih canggih, serta infrastruktur pendukung yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Aurelia et al., 2024).

Ukuran pemerintah daerah yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan untuk merekrut tenaga ahli akuntansi yang kompeten dan menggunakan sistem informasi akuntansi modern (Hariani & Fakhroazi, 2021). Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mematuhi SAP berbasis akrual, yang pada akhirnya meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan mereka. Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini dinyatakan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Total Government size} = \text{Total Asset}$$

2.1.5 Kemandirian daerah Daerah (Financial Independence)

Kemandirian daerah merupakan ukuran sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam manajemen sumber daya keuangannya secara mandiri tanpa adanya ketergantungan yang signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat Wurangian & Sannie (2025). Secara teoretis, hubungan antara kemandirian daerah daerah dan kualitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan melalui perspektif teori stewardship. Teori ini menyatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki otonomi

tinggi dalam pengelolaan keuangan memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam melaksanakan menyusun laporan keuangan yang lebih akurat sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Daerah yang memiliki kapasitas keuangan mandiri cenderung lebih berkomitmen untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut (Toyyib, 2023) kemandirian daerah daerah diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Indikatore dalam rasio ini mencerminkan sejauh mana PAD mampu mendukung pembiayaan operasional pemerintah daerah dan kegiatan pembangunan. Daerah yang memiliki rasio kemandirian daerah yang tinggi dianggap lebih mampu mengelola keuangannya secara akuntabel dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini mengindikasikan sejauh mana nilai PAD berkontribusi terhadap total pendapatan suatu daerah. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar kemandirian daerah daerah. Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian yang rendah biasanya lebih bergantung pada dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam

pengelolaan keuangan dan menurunkan kualitas laporan keuangan (Maggara et al., 2024)

2.1.6 Status Pemerintah Daerah (Local Government Status)

Status pemerintah daerah merujuk pada bentuk administratif daerah otonom yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu kabupaten dan kota, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan status ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah, tingkat pembangunan, serta kapasitas birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah kota umumnya memiliki karakteristik wilayah yang lebih urban, dengan tingkat kepadatan penduduk, akses teknologi, dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten. Kota juga cenderung memiliki kualitas SDM yang lebih baik, serta sistem informasi dan pengelolaan keuangan yang relatif lebih modern. Hal ini dapat memberikan keunggulan dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena ditopang oleh kapasitas kelembagaan dan teknologi yang memadai.

Menurut teori institusional, organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan praktik-praktik yang dianggap legitim oleh lingkungan eksternal untuk mempertahankan eksistensinya (Dimaggio & Powell, 1983). Dalam

konteks ini, pemerintah kota, yang berada dalam tekanan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat urban, cenderung lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola, termasuk dalam pelaporan keuangan.

2.1.7 Pengalaman Kepala Daerah dan Kapabilitas APIP

Pengalaman kepala daerah didefinisikan sebagai jumlah tahun seorang pemimpin memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan. Pengalaman ini dianggap signifikan karena pemimpin yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang pengelolaan sumber daya publik dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Matsunaga & Yeung, 2011), pengalaman kerja di bidang tertentu meningkatkan kemampuan pemimpin dalam mengatasi kompleksitas administrasi dan tata kelola keuangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah yang memiliki latar belakang di bidang pemerintahan lebih cenderung mampu memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Aurelia et al., 2024).

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan yang didukung dengan pengawasan yang baik sehingga mampu mendorong hasil pengawasan yang berkualitas (BPKP, 2021). APIP berperan dalam melakukan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek keuangan. Semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP, maka semakin besar pula kemampuannya dalam mendeteksi penyimpangan, memberikan rekomendasi yang konstruktif, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan (Peraturan Kepala BPKP, 2016), kapabilitas APIP diklasifikasikan ke dalam lima level yang mencerminkan tingkat kematangan institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan intern secara efektif dan profesional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu atas beberapa faktor yang memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Variabel yang digunakan	Sampel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Aurelia Clara, dkk (2024)	Variabel Independen: 1. Belanja modal 2. Ukuran pemerintah daerah 3. Kemandirian daerah daerah 4. Status pemerintah daerah 5. Pengalaman pemimpin 6. Usia pemimpin	Sampel: Seluruh pemerintah daerah di Pulau Sumatera (154 pemerintah daerah) Metode analisis data: regresi logistik multinomial	1. Belanja modal memiliki korelasi negatif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan 2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan 3. Kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan

		Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan		<p>4. Status pemerintah daerah kota memiliki kualitas pelaporan yang lebih tinggi disbanding kabupaten.</p> <p>5. Pengalaman walikota yang lebih lama berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan.</p> <p>6. Usia walikota berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.</p>
2.	I Gusti Ayu Purnamawati, Saerce Elsy Hatane (2020)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan pengalaman bekerja 2. Implementasi SIA 3. Peran audit internal <p>Variabel Dependen: Kualitas pelaporan keuangan</p>	<p>Sampel: Kepala departemen keuangan dan staf akuntansi pada setiap unit kerja di Kabupaten Buleleng, Bali</p> <p>Metode analisis data: regresi linear berganda</p>	Kompetensi dan pengalaman bekerja (faktor internal), implementasi SIA, peran internal audit (faktor eksternal) memiliki korelasi positif dan dampak yang signifikan pada kualitas laporan keuangan.
3.	Utami & Sulardi (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik pemerintah daerah 2. Opini audit 3. Rasio kemandirian daerah <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Sampel: Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017</p> <p>Metode analisis data: regresi logistik dengan binary outcome</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel populasi dan IPM berpengaruh positif dalam pengungkapan laporan keuangan pemda. 2. Variabel opini dan rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan.

		Pengungkapan laporan keuangan pemerintah		
4.	Rakhman & Wijayana (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja modal 2. Opini audit 3. Rasio kemandirian <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kualitas laporan keuangan</p>	<p>Sampel: Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2008-2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi belanja modal berhubungan dengan rendahnya kualitas laporan keuangan. 2. Ukuran dan kekayaan pemerintah daerah berhubungan dengan tingginya kualitas laporan keuangan. 3. Pemerintah daerah dengan pemimpin yang berpengalaman memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi.
5.	Firmansyah, Arfiansyah, et al. (2022)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah 2. Belanja pemerintah daerah 3. Kemandirian daerah <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kualitas pelaporan keuangan</p>	<p>Sampel: Laporan Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2016-2020</p> <p>Metode analisis data: regresi logistik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran daerah dan belanja daerah terkait secara positif dengan kualitas laporan keuangan 2. Kemandirian daerah berkorelasi negative dengan kualitas laporan keuangan.
6.	Amrie firmansyah, Muhammad rizal	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi pemerintah daerah 	<p>Sampel: Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016-2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengaruh positif transparansi keuangan pemerintah daerah dan belanja modal terhadap

	yuniar, & zef arfiansyah (2022)	2. Belanja modal 3. Tingkat Kesehatan keuangan 4. Ukuran pemerintah daerah Variabel Dependen: Kualitas pelaporan keuangan	Metode analisis data: regresi logistik dengan binary outcome	kualitas laporan keuangan. 2. Tidak ada pengaruh belanja modal dan kesehatan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
7.	Nasrullah Djamil (2023)	Variabel Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. Pendanaan Perusahaan 3. Likuiditas 4. Good Corporate Governance Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan	Sampel: Perusahaan BUMN 2017-2019 Metode analisis data: analisis regresi panel data	Kualitas laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran Perusahaan, pendanaan Perusahaan, likuiditas, dan tata kelola perusahaan.
8.	Digdowise iso et al. (2022)	Variabel Independen: 1. Pendanaan 2. Ukuran Perusahaan 3. Volatilitas arus kas 4. Volatilitas penjualan 5. Siklus operasi & proporsi kerugian 6. Intensitas asset tak berwujud 7. Intensitas modal Variabel Dependen:	Sampel: Perusahaan Non Jasa Keuangan di BEI tahun 2015-2019 Metode analisis data: deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi	1. Pendanaan, ukuran perusahaan, & intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Siklus operasi, proporsi kerugian, dan intensitas asset tak berwujud berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

		Kualitas laporan keuangan		
9.	Karaeng & Oktaviani (2023)	<p>Variabel bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas APIP 2. Maturitas SPIP 3. Objektivitas <p>Variabel terikat:</p> <p>Kualitas laporan keuangan</p>	<p>Sampel: APIP pada Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 52 orang</p> <p>Metode analisis regresi linear berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, dan Objektivitas secara parsial terhadap Kualitas laporan keuangan. 2. Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP dan Objektivitas secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan. 3. Maturitas SPIP merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan.
10.	Anto & Yusran (2023)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian internal 2. Teknologi informasi 3. Penerapan standar akuntansi 4. Kompetensi sumber daya manusia 5. Peran auditor internal <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kualitas laporan keuangan</p>	<p>Sampel: Staf akuntansi kota Kendari, Sulawesi Tenggara</p> <p>Metode analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian internal, teknologi informasi, penerapan standar akuntansi dan peran auditor internal memiliki peran positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 2. Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

11.	Fadilah & Andriani (2025)	<p>Variabel bebas: PAD, belanja modal, dana perimbangan</p> <p>Variabel terikat: kinerja keuangan</p> <p>Variabel moderasi: partisipasi masyarakat</p>	<p>Sampel: 31 provinsi di Indonesia periode 2019-2023</p> <p>Metode analisis: analisis regresi data panel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya nilai PAD dan belanja modal memiliki positif terhadap kinerja keuangan 2. Dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
-----	---------------------------	--	---	---

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap seperti gedung, jalan, jaringan irigasi, tanah, peralatan, dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang. Pengalokasian anggaran pada belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur publik yang berdaya guna serta mendukung terwujudnya optimalisasi pelayanan publik. Sejalan dengan itu, belanja modal juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025) menunjukkan bahwa besarnya belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya peningkatan belanja modal mencerminkan adanya investasi yang produktif dalam bentuk aset tetap, yang selanjutnya akan memperkuat posisi keuangan daerah dan

meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran juga berkaitan erat dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dua elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Temuan serupa juga dinyatakan dari penelitian Digdowiseiso et al. (2022), bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada sektor perusahaan non-keuangan, prinsip dasarnya dapat ditarik ke sektor publik, yakni semakin besar proporsi aset tetap yang berasal dari belanja modal, maka semakin besar pula kemungkinan manajemen menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dengan pendekatan stewardship, belanja modal menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah sebagai lembaga publik untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan belanja modal secara tidak langsung akan mendorong pemerintah menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik.

H1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Ukuran pemerintah daerah mencerminkan kapasitas kelembagaan yang dimiliki suatu daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya publik yang dikuasainya. Pemerintah daerah yang berukuran besar cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten, sistem informasi yang lebih lengkap, serta proses administrasi yang lebih mapan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang besar memiliki kemampuan lebih baik dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam perspektif teori stewardship, aparatur pemerintah bertindak sebagai pengelola (steward) yang memiliki niat dan kepentingan selaras dengan tujuan publik (prinsipal), yaitu mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Teori ini menekankan bahwa steward memiliki motivasi intrinsik untuk menunjukkan kinerja terbaik dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar, justru lebih terdorong untuk menunjukkan kinerja akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Kualitas laporan keuangan menjadi wujud tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik.

Penelitian empiris mendukung pandangan tersebut. Penelitian oleh Firmansyah, Arfiansyah, et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini karena daerah yang besar memiliki struktur birokrasi, sistem informasi, serta kontrol internal yang lebih kuat, yang memungkinkan proses pelaporan keuangan dilakukan secara lebih sistematis dan akurat. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Firmansyah, Arfiansyah, et al. (2022) dalam studi terhadap pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, bahwa ukuran pemerintah daerah secara signifikan meningkatkan peluang untuk memperoleh opini WTP dari BPK, yang merupakan indikator dari kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Digdowiseiso et al. (2022) dalam konteks perusahaan pun menguatkan bahwa ukuran entitas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, karena entitas besar lebih memiliki tanggung jawab publik, akses sumber daya, dan tekanan tata kelola yang lebih tinggi.

H2: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Kemandirian daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja pemerintah dari pendapatan asli daerah (PAD), tanpa

bergantung secara berlebihan pada dana transfer pusat. Dalam perspektif teori stewardship, daerah yang mandiri akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan karena adanya tuntutan dari masyarakat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik yang berasal dari wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, semakin tinggi kemandirian daerah, diharapkan kualitas pelaporan keuangan juga akan semakin baik. Menurut hasil penelitian Taek (2019), tingkat kemandirian keuangan daerah terbukti mampu mendorong perbaikan kinerja keuangan. Dengan kata lain, semakin tinggi kemandirian yang dimiliki, semakin baik pula kinerja keuangan yang dapat dicapai.

Namun, di sisi lain, beberapa studi menunjukkan bahwa tingginya kemandirian fiskal tidak selalu berdampak positif terhadap kualitas pelaporan. Studi yang dilakukan Aurelia et al. (2024) menemukan adanya pengaruh negatif kemandirian terhadap kualitas laporan keuangan. Daerah dengan PAD tinggi terkadang justru memiliki fleksibilitas tinggi dalam pengeluaran, yang dapat menurunkan kedisiplinan anggaran dan tata kelola keuangan (Firmansyah, Arfiansyah, et al., 2022). Kurangnya pengawasan eksternal juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi laporan keuangan, apalagi jika kapasitas kelembagaan daerah belum memadai. Sehingga, hipotesis dinyatakan sebagai berikut.

H3: Kemandirian daerah daerah memiliki pengaruh pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.4 Pengaruh Status Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Status administratif pemerintah daerah (kabupaten atau kota) mencerminkan perbedaan dalam tingkat urbanisasi, kapasitas birokrasi, serta tuntutan publik terhadap tata kelola keuangan. Pemerintah kota, yang umumnya berada di wilayah perkotaan, diasumsikan memiliki akses terhadap sumber daya manusia yang lebih berkualitas, teknologi informasi yang lebih baik, serta tekanan publik yang lebih tinggi terhadap transparansi, sehingga lebih mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian Aurelia et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah kota memiliki lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur pengelolaan keuangan dan tekanan akuntabilitas yang lebih kuat di daerah perkotaan. Temuan tersebut senada dengan penelitian Hafsari (2020) yang mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga, hipotesis dinyatakan sebagai berikut.

H4: Status pemerintah daerah kota memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap kualitas pelaporan keuangan dibandingkan kabupaten.

2.3.5 Pengaruh Pengalaman Kepala Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Pengalaman kepala daerah dalam pemerintahan diyakini dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah secara efektif. Pemimpin yang berpengalaman memahami regulasi, proses penyusunan anggaran, serta mampu mengawasi jalannya sistem informasi akuntansi secara lebih baik. Dalam teori stewardship, kepala daerah yang berpengalaman cenderung memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang lebih tinggi dalam menjaga akuntabilitas keuangan.

Rakhman dan Wijayana (2019) menyimpulkan bahwa semakin berpengalaman seorang kepala daerah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dapat disajikan. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Aurelia et al. (2024) yang menyatakan hubungan positif signifikan antara lama pengalaman kepala daerah dan kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil tersebut, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H5: Pengalaman Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

2.3.6 Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) menggambarkan tingkat kematangan dan efektivitas lembaga pengawasan internal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Dalam teori stewardship, pengawasan yang baik melalui APIP akan memperkuat sistem akuntabilitas dan mendorong terciptanya laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai standar. APIP yang kapabel dapat membantu mendeteksi kesalahan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

Penelitian Purnamawati & Hatane (2020) menunjukkan bahwa kapabilitas auditor internal, termasuk APIP, memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karaeng & Oktaviani (2023) juga menemukan bahwa kapabilitas APIP secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut merupakan rumusan hipotesis yang dapat diajukan.

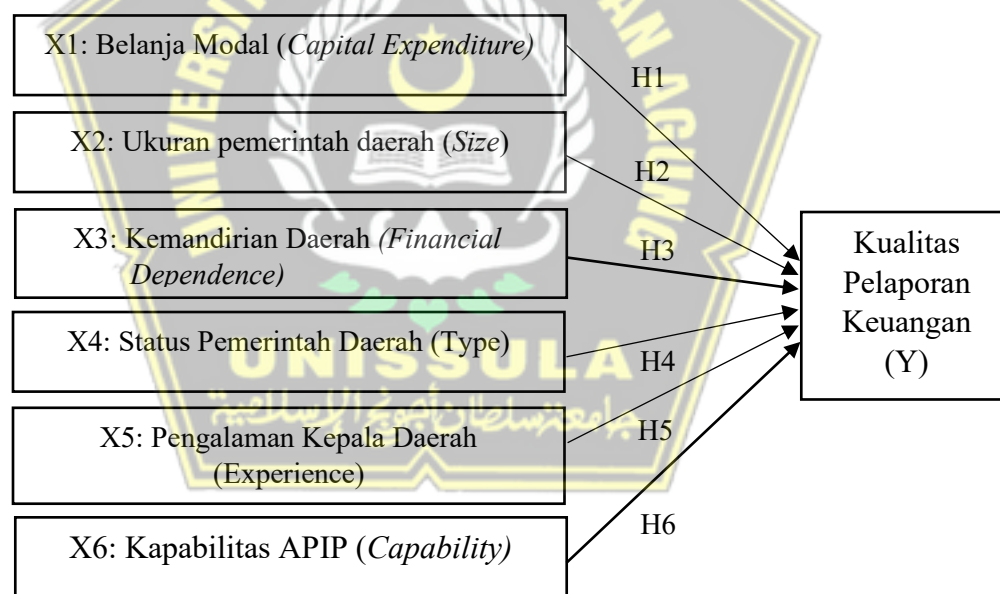
H6: Kapabilitas APIP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai indikator-indikator dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mencerminkan transparansi

serta akuntabilitas publik. Indikator tersebut direfleksikan melalui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam konteks ini diproksikan melalui opini audit dari BPK. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka penelitian ini disusun untuk menggambarkan korelasi antara beberapa variabel independen—yaitu belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, dan kapabilitas APIP—terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 1 Model Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji hubungan sebab-akibat. Pendekatan yang digunakan adalah **kuantitatif**, yang artinya data diukur dan dianalisis secara numerik untuk mencari tahu bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lainnya. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh antar variabel secara objektif dan terukur melalui data angka yang diperoleh dari laporan keuangan dan sumber resmi lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel seperti belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal, status administratif, pengalaman kepala daerah, dan kapabilitas APIP terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2022), penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan alat statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Penelitian ini mengambil populasi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Entitas tersebut mencakup pemerintah daerah kabupaten dan kota yang telah menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2015 s.d. 2023.

3.2.2 Sampel

Teknik **sampel jenuh** digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penentuan sampel dimana seluruh data populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2013). Penggunaan teknik ini dimaksudkan karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruh unit populasi memenuhi kriteria kelayakan untuk dijadikan sumber data sehingga tingkat kesalahan dapat diminimalisir. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama periode 2015 s.d. 2023, sebanyak 35 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah secara rutin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk diaudit. Dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi empiris secara menyeluruh dan meningkatkan validitas temuan.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari instansi resmi pemerintah. Data realisasi anggaran, yang mencakup informasi mengenai pendapatan, belanja, dan belanja modal, diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan data belanja modal dan PAD diperoleh dari LKPD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipublikasikan oleh masing-masing pemerintah daerah. LKPD audited digunakan untuk memastikan keandalan data keuangan yang digunakan dalam penelitian. Adapun data mengenai kapabilitas APIP diperoleh dari Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) yang merupakan publikasi resmi BPKP dan diterbitkan secara berkala. Seluruh sumber data tersebut dipilih untuk menjamin validitas, akurasi, dan relevansi informasi terhadap setiap variabel yang diteliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang mencakup pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber resmi pemerintah yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Teknik ini memungkinkan seluruh data yang digunakan dalam penelitian telah tersedia dalam bentuk arsip digital dan publikasi resmi yang dapat diakses secara daring.

Data realisasi anggaran, termasuk informasi mengenai pendapatan, belanja total, dan belanja modal, diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) melalui situs resminya di <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>. DJPK menyediakan basis data keuangan daerah yang terstruktur dan mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya, data mengenai belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK. LKPD audited ini dipublikasikan oleh masing-masing pemerintah daerah, baik melalui laman resmi pemerintah daerah maupun diperoleh melalui mekanisme permohonan informasi publik. Informasi mengenai opini audit dan hasil pemeriksaan terhadap LKPD dikumpulkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK dan dapat diakses melalui laman <https://www.bpk.go.id>.

LHP ini memberikan data kategorik mengenai kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar audit keuangan negara.

Sementara itu, data mengenai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperoleh dari Laporan Kinerja BPKP yang dipublikasikan secara berkala oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui situs <https://www.bpkp.go.id>. Seluruh data yang digunakan dikumpulkan untuk periode tahun 2015 hingga 2023 dan disusun dalam format data panel untuk kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistik.

3.5 Variabel dan Indikator

Penelitian ini melibatkan dua kategori variabel, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang merepresentasikan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, variabel independen terdiri dari enam faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas pelaporan tersebut, yaitu: belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian fiskal daerah, status administratif pemerintah daerah, pengalaman kepala daerah, dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Masing-masing variabel independen diukur menggunakan indikator tertentu yang relevan, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Kualitas pelaporan keuangan mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan secara andal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan SAP berbasis akrual yang diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Variabel ini diukur melalui opini audit yang diterbitkan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencerminkan tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, opini audit diklasifikasikan ke dalam bentuk skor kategorik, dengan pengkodean sebagai berikut:

- Skor 1 diberikan untuk opini WTP,
- Skor 0 diberikan untuk opini Non-WTP.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari belanja modal, ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, status pemerintah daerah dan pengalaman kepala daerah, dan usia kepala daerah.

1) Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah guna memperoleh ataupun menambah aset tetap yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan layanan publik. Secara teoritis, semakin tinggi porsi belanja modal dibandingkan dengan

total belanja daerah, maka semakin besar pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan, dengan catatan pengelolaannya dilakukan secara efisien dan tepat. Definisi operasional belanja modal diukur sebagai persentase belanja modal terhadap total belanja daerah, berdasarkan data APBD yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Indeks belanja modal dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{CAPEX ratio} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja}}$$

2) Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*)

Ukuran pemerintah daerah ditentukan dari total aset yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah dengan anggaran yang lebih besar diharapkan memiliki SDM, teknologi, dan kapasitas manajerial yang lebih baik untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Definisi operasional variabel ini adalah total APBD yang dinyatakan dalam miliar atau triliun rupiah. Ukuran Daerah dapat diukur menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$\text{Total Government size} = \ln(\text{Total Asset})$$

3) Kemandirian Daerah (*Financial Independent*)

Kemandirian daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya secara mandiri menggunakan PAD tanpa tergantung pada dana transfer. Variabel ini diukur melalui rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin mandiri pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Kemandirian daerah Daerah dapat diukur sebagai berikut.

$$\text{FINDEP} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

4) Status Pemerintah Daerah

Status pemerintah daerah merujuk pada pengelompokan administratif menjadi kabupaten atau kota. Pemerintah kota sering diasumsikan memiliki laporan keuangan yang lebih berkualitas karena tingkat modernitas dan kompleksitasnya yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Definisi operasionalnya berupa variabel dummy (0 untuk kabupaten, 1 untuk kota).

5) Pengalaman Pemimpin (*Mayor Experience*)

Pengalaman kepala daerah merupakan akumulasi jumlah tahun seorang individu menjabat sebagai bupati atau wali kota pada daerah yang sama. Pengalaman ini dihitung berdasarkan masa jabatan

efektif, dengan ketentuan maksimal selama 10 tahun sesuai dengan batas periode kepemimpinan kepala daerah. Pengalaman kepala daerah yang lebih panjang diasumsikan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah.

6) Kapabilitas APIP (*Capability*)

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah tingkat kemampuan unit pengawasan internal pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kapabilitas ini mencerminkan tingkat kematangan sistem, proses, sumber daya manusia, dan tata kelola pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Dalam penelitian ini, kapabilitas APIP diukur berdasarkan level kapabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Perka BPKP No. 4 Tahun 2016, yang terdiri dari lima level, yaitu:

Level 1 (Initial): Fungsi pengawasan belum berjalan secara formal.

Level 2 (Infrastructure): Fungsi dasar pengawasan sudah dibentuk dan mulai berfungsi.

Level 3 (Integrated): Proses pengawasan mulai terintegrasi dengan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Level 4 (Managed): Fungsi pengawasan telah berperan dalam pengambilan keputusan manajemen dan peningkatan kinerja organisasi.

Level 5 (Optimized): Fungsi pengawasan sepenuhnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan tata kelola yang unggul.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu regresi logistik. Pemilihan regresi logistik didasarkan pada sifat variabel dependen penelitian ini yang bersifat kategorikal, yakni kualitas penyajian informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang diukur berdasarkan opini hasil audit. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap peluang pemerintah daerah memperoleh kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik data. Melalui teknik ini, data dapat

diuraikan dalam bentuk ukuran data seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta standar deviasi sehingga memberikan gambaran awal mengenai kondisi variabel yang diteliti. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa tujuan penggunaan statistik deskriptif adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh apa adanya, tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum bagi seluruh populasi. Hal senada juga disampaikan oleh Sugiyono (2022), bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data numerik dalam bentuk yang sederhana agar mudah dipahami, seperti dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data.

Melalui statistik deskriptif, peneliti dapat mengetahui kecenderungan umum data, tingkat keragaman antar observasi, serta mendeteksi kemungkinan adanya data ekstrem (outlier) atau distribusi yang tidak lazim. Selain itu, analisis ini juga menjadi tahap awal sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut seperti regresi logistic. Statistik deskriptif dalam penelitian ini diterapkan terhadap seluruh variabel, yaitu ukuran pemerintah daerah (SIZE), kemandirian fiskal (FINDEP), belanja modal (CAPEX), pengalaman kepala daerah (EXPN), status administratif (STATUS), kapabilitas APIP, dan opini audit (OPINI).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik: Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya Uji multikolinearitas Adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen yang dapat menyebabkan

distorsi pada penafsiran model regresi (Hosmer et al., 2013). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai $VIF < 10$ dan nilai Toleransi $> 10\%$, maka dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas (Gujarati, 2009).

3.6.3 Deteksi Outlier

Dalam analisis regresi logistik biner, keberadaan outlier dan kasus pengaruh tinggi (influential cases) dapat memengaruhi stabilitas dan validitas model. Oleh karena itu, sebelum melakukan interpretasi hasil regresi, penting untuk mengidentifikasi dan menangani observasi-observasi yang berpotensi mengganggu estimasi model.

Deteksi outlier dilakukan dengan menggunakan nilai residual yang distandarisasi (Standardized Residual/ZRE). Residual yang terstandarisasi memberikan informasi mengenai seberapa jauh suatu pengamatan menyimpang dari nilai prediksi model. Observasi dengan nilai $|ZRE| > 2,5$ hingga 3 dianggap sebagai outlier yang potensial Ghazali (2021). Dalam penelitian ini, pengamatan dengan nilai ZRE melebihi ± 3 dipertimbangkan sebagai kandidat outlier dan diperiksa lebih lanjut.

Selain ZRE, peneliti juga menggunakan Cook's Distance (COO) untuk mengidentifikasi observasi yang memiliki pengaruh besar terhadap estimasi parameter model. Cook's Distance menggabungkan informasi tentang leverage (posisi pengamatan terhadap keseluruhan data) dan residual. Nilai Cook's

Distance yang melebihi $4/n$ (di mana n adalah jumlah total observasi) mengindikasikan bahwa suatu pengamatan berpotensi memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil model (Hair et al., 1998).

3.6.4 Analisis Regresi Logistik Biner

Penggunaan analisis regresi logistik biner dalam penelitian ini karena variabel dependen yang digunakan bersifat dikotomis, yaitu opini audit BPK yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Non-WTP (termasuk TW, WDP, dan WTP-DPP). Regresi logistik biner bertujuan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen kategori biner (0 dan 1) dengan satu atau lebih variabel independen, baik numerik maupun kategorikal Hosmer et al. (2013). Secara matematis, model ini dituliskan sebagai berikut.

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k$$

Keterangan:

- P : probabilitas kejadian,
- β_0 : konstanta,
- β_i : koefisien regresi variabel independen X_i ,
- X_k : nilai dari variabel independen ke- k .

3.6.4.1 Uji Kebaikan Model (*Goodness-of-Fit*)

Uji *Goodness-of-Fit* digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi yang dibangun mampu merepresentasikan data empiris. Melalui uji ini, dapat diketahui apakah model regresi yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi nyata atau justru terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diprediksi oleh model dengan data observasi. Uji *Goodness-of-Fit* menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh dapat diandalkan serta layak digunakan dalam menarik kesimpulan penelitian. Indikator yang digunakan antara lain nilai -2 Log Likelihood, Chi-square pada model fitting information, serta uji Pearson dan Deviance. Menurut Hosmer et al. (2013), model dikatakan memiliki kecocokan yang baik (fit) apabila nilai signifikansi (Sig.) dari Hosmer and Lemeshow Test lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai yang diprediksi model dengan data actual yang menunjukkan model dianggap mampu merepresentasikan pola data secara keseluruhan. Hasil uji goodness of fit ini juga memberikan dasar apakah model regresi logistik layak untuk dianalisis lebih lanjut. Apabila nilai Sig. < 0,05, maka model dianggap tidak sesuai (misfit) dan hasil estimasi koefisien dapat diragukan Ghozali (2021).

3.6.4.2 Uji *Likelihood Ratio* (Omnibust Test)

Uji keberartian model adalah cara untuk menentukan apakah variabel-variabel independen yang dipakai dalam penelitian, jika digabungkan, memiliki

pengaruh yang signifikan atau berarti terhadap variabel dependen. Jika hasilnya signifikan, itu berarti model yang dibangun secara keseluruhan dapat digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen, yaitu kualitas pelaporan keuangan. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menilai apakah model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Uji ini dikenal sebagai *Likelihood Ratio Test* (G test), dengan hipotesis nol menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol. Jika nilai signifikansi uji $< 5\%$, maka hipotesis nol ditolak, artinya model dengan variabel independen lebih baik dibandingkan model tanpa variabel (intercept only model).

3.6.4.3 Uji Wald dan Interpretasi Koefisien Regresi

Uji Wald dipakai untuk mengecek apakah setiap variabel bebas (independen) secara terpisah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Melalui uji ini dapat dilihat signifikansi kontribusi setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. *Uji Wald* membantu peneliti dalam menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan serta variabel mana yang tidak memberikan pengaruh berarti terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika nilai signifikansi Wald $< 5\%$, maka variabel tersebut dianggap memiliki signifikansi pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Dengan kata lain, nilai ini memberikan gambaran mengenai kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Dalam regresi logistik ordinal, digunakan nilai Nagelkerke R^2 sebagai indikator. Nilai ini berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1, dengan nilai yang lebih tinggi merepresentasikan kemampuan dalam memprediksi model dengan lebih baik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam kajian ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta memperoleh opini audit dari BPK periode 2015 s.d. 2023. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 35 entitas pemerintah daerah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Seluruh entitas tersebut dijadikan sampel dengan metode sensus. Dengan demikian, jumlah total sampel penelitian mencapai 315 observasi, yang ringkasan hasil opininya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Opini Audit Tahun 2015-2023

		Frequency	Percent
Valid	Non WTP	26	8.3
	WTP	289	91.7
	Total	315	100.0

Sumber: Data BPK diolah (2025)

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Analisis uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Melalui analisis ini, data disajikan dalam bentuk ukuran-ukuran statistik meliputi nilai minimum, maksimum,

rata-rata (mean), dan standar deviasi. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian secara lebih jelas, sehingga dapat memberikan gambaran umum sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dengan metode regresi logistik. Berikut disajikan dalam tabel 4.2 data statistik dari setiap variabel.

Tabel 4. 2

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Maxi	Mean	Std. Dev
SIZE	315	25.88	31.51	29.01	0.54
FINDEP	315	8.75	51.23	18.34	6.84
CAPEX	315	4.29	44.04	15.89	5.38
EXPN	315	1	10	4.30	2.661

Sumber: Data diolah (2025)

1. Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)

Variabel ukuran pemerintah daerah direpresentasikan dalam bentuk logaritma natural dari total asset dalam APBD. Rata-rata SIZE adalah 29,01, dengan nilai minimum 25,88 pada Kabupaten Purworejo tahun 2017 dan maksimum 31,51 pada Kota Semarang tahun 2023. Standar deviasi sebesar 0,54 menunjukkan bahwa variasi antar pemerintah daerah relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran anggaran antar daerah dalam sampel tidak terlalu timpang.

2. Kemandirian Daerah (FINDEP)

Kemandirian daerah menunjukkan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Rata-rata kemandirian fiskal sebesar 18,34%, dengan standar deviasi 6,84, mengindikasikan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar daerah

dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Rentang nilai kemandirian daerah berkisar antara 8,75% diperoleh Kabupaten Klaten 2015 hingga 51,23% yang diperoleh Kota Semarang 2022.

3. Belanja Modal (CAPEX)

Pengukuran variabel belanja modal dilakukan dengan melihat proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rata-rata CAPEX sebesar 15,89%, dengan nilai minimum 4,29% pada Kabupaten Rembang tahun 2015 dan maksimum 44,04% pada Kabupaten Temanggung tahun 2017, serta standar deviasi 5,38. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa daerah memiliki alokasi belanja modal yang tinggi, namun sebagian besar berada pada kisaran menengah.

4. Pengalaman Kepala Daerah (EXPN)

Pengalaman kepala daerah diukur berdasarkan jumlah tahun kepala daerah menjabat selama periode pengamatan. Rata-rata pengalaman kepala daerah adalah 4,30 tahun, dengan nilai minimum 1 tahun yang dijabat oleh pelaksana tugas dan maksimum 10 tahun, serta deviasi standar 2,66. Hal ini menunjukkan adanya distribusi pengalaman yang cukup beragam antar kepala daerah dalam sampel.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Hubungan yang terlalu tinggi antar variabel bebas dapat menimbulkan masalah,

karena berpotensi memengaruhi kestabilan dan keakuratan estimasi koefisien regresi. Uji ini menjadi urgensi untuk dilakukan agar model regresi yang dibangun dapat memberikan hasil analisis yang valid dan reliabel. Berdasarkan output uji multikolinearitas, diperoleh nilai tolerance untuk seluruh variabel independen (SIZE, CAPEX, EXPN, STATUS, dan APIP) berada di atas 0,10, yaitu berkisar antara 0,859 hingga 0,968. Demikian pula, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk seluruh variabel juga berada jauh di bawah ambang batas 10, yaitu antara 1,033 hingga 1,164. Merujuk pada Ghazali (2018) nilai toleransi di atas 0,10 dan VIF di bawah 10 mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik simpulan bahwa model regresi ini bebas dari masalah multikolinearitas dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 4. 3
Uji Multikolinearitas

Model	Statistik kolinearitas	
	Toleransi	VIF
SIZE	0.859	1.164
CAPEX	0.862	1.160
EXPN	0.968	1.033
STATUS	0.872	1.147
APIP	0.860	1.163
a. Dependent Variable: FINDEP		

4.2.3. Hasil Deteksi Outlier

Identifikasi terhadap data outlier bertujuan untuk meyakinkan bahwa model regresi yang digunakan tidak dipengaruhi oleh observasi ekstrem yang dapat mendistorsi hasil analisis. Outlier dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan nilai Z-Resid (ZRE), di mana observasi dengan nilai ZRE di luar rentang ± 3 dianggap sebagai data yang menyimpang secara signifikan dari pola umum data. Terdapat tujuh observasi yang teridentifikasi sebagai outlier, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.4. Seluruh observasi tersebut memiliki nilai ZRE yang berada dibawah -3 atau diatas 3, yang mengindikasikan bahwa nilai aktual jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang diprediksi oleh model. Keberadaan data-data tersebut berpotensi mengganggu estimasi koefisien regresi dan mengurangi validitas hasil analisis. Oleh karena itu, observasi yang teridentifikasi sebagai outlier dikeluarkan dari analisis regresi lanjutan.

Tabel 4. 4

Tabel Outlier

No.	Nama Daerah	Tahun	COO_1	ZRE_1	Keterangan
1	Kab Batang	2015	0.14745	-3.32488	Outlier
2	Kab Brebes	2015	0.17813	-3.70095	Outlier
3	Kota Semarang	2015	1.23836	-2.07553	Outlier
4	Kab Kebumen	2016	0.48484	-4.42750	Outlier
5	Kab Klaten	2017	0.16157	-3.41456	Outlier
6	Kab Rembang	2017	0.28460	-3.16733	Outlier
7	Kab Brebes	2018	0.23547	-4.53502	Outlier

Sumber: Data diolah (2025)

4.2.4 Hasil Regresi Logistik Biner

4.2.4.1 Hasil Uji Kebaikan Model (*Hosmer and Lemeshow Test*)

Hasil pengujian Hosmer dan Lemeshow digunakan untuk mengevaluasi kecocokan (goodness-of-fit) model regresi logistik dengan data aktual. Pengujian ini membandingkan antara probabilitas prediksi model dengan data observasi aktual. Berdasarkan hasil uji Hosmer and Lemeshow yang disajikan dalam tabel 4.5, diperoleh nilai Chi-square sebesar 2,918 dengan derajat kebebasan (df) 8 dan signifikansi sebesar 0,939. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai yang sebenarnya. Dengan demikian, model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki tingkat kecocokan yang baik (goodness of fit) dan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 4. 5

Uji Kecocokan Model Hosmer dan Lemeshow Regresi Logistik Biner

Chi-square	df	Sig.
2.918	8	0.939

Sumber: Data diolah (2025)

4.2.4.2 Hasil Uji Likelihood Ratio Test

Uji Omnibus atau Likelihood Ratio Test dilakukan untuk melihat apakah model regresi logistik yang dibangun secara keseluruhan signifikan secara statistik dan seluruh secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan model yang hanya berisi konstanta (tanpa

variabel bebas) dengan model yang sudah memasukkan semua variabel independen. Hasil uji *Omnibus Tests of Model Coefficients* mengindikasikan bahwa model regresi logistik yang dibangun memiliki nilai Chi-square sebesar 63,307 dengan derajat kebebasan (df) sebanyak 6 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun secara keseluruhan signifikan secara statistik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis lebih lanjut yaitu uji Wald dan interpretasi koefisien regresi setiap variabel.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Omnibus Terhadap Model Regresi Logistik Biner

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	63.307	6	0.000
	Block	63.307	6	0.000
	Model	63.307	6	0.000

Sumber: Data diolah (2025)

4.2.4.3 Interpretasi Koefisien Ratio dan Hasil Uji Regresi Logistik

Berdasarkan hasil *Model Summary*, nilai -2 Log Likelihood sebesar 79,352 mengindikasikan bahwa model regresi logistik memiliki kecocokan yang cukup baik terhadap data. Nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,186 dan Nagelkerke R Square sebesar 0,501 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variabilitas pada variabel dependen sebesar 18,6% hingga 50,1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sekitar 50 persen variasi pada kualitas laporan keuangan dapat direpresentasikan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan hal hal lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, proses estimasi model mengalami

konvergensi pada iterasi ke-8, yang berarti bahwa parameter model telah mencapai titik kestabilan.

Tabel 4. 7

Hasil Ringkasan Model Regresi Logistik Biner (Model Summary)

-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
79.352 ^a	0.186	0.501

Sumber: data diolah (2025)

Tabel 4. 8

Hasil Output Variables in the Equation dalam Regresi Logistik Biner

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1^a	SIZE	1.185	0.624	3.601	1	0.058	3.270
	FINDEP	-0.047	0.107	0.190	1	0.663	0.954
	CAPEX	0.135	0.066	4.181	1	0.041	1.145
	EXPN	0.030	0.115	0.069	1	0.792	1.031
	STATUS(1)	0.843	1.321	0.407	1	0.523	2.322
	APIP	2.995	0.645	21.549	1	0.000	19.988
	Constant	-38.744	17.499	4.902	1	0.027	0.000

Sumber: Data diolah (2025)

Pada tabel 4.8 disajikan hasil pengujian regresi logistik biner terhadap enam variabel independen, yakni ukuran pemerintah daerah (SIZE), kemandirian keuangan daerah (FINDEP), belanja modal (CAPEX), belanja operasional (EXPN), status opini audit (STATUS), dan kapabilitas aparat pengawasan intern (APIP), dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel terhadap kualitas penyajian informasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa variabel CAPEX dan APIP memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel CAPEX menunjukkan nilai signifikansi 0,041 yang berada di bawah ambang batas signifikansi 5%, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,135 dan nilai odds ratio (Exp(B)) sebesar 1,145. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam proporsi belanja modal akan meningkatkan peluang pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebesar 14,5%. Hasil ini menyatakan bahwa proporsi belanja modal yang tinggi dapat mencerminkan alokasi anggaran yang lebih efisien dan produktif, sehingga turut mendukung kualitas pelaporan keuangan.

Selanjutnya, variabel APIP menunjukkan pengaruh yang paling signifikan dalam model, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Angka 2,995 sebagai koefisien regresi dan 19,988 yang menunjukkan nilai Exp(B) mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dengan kapabilitas APIP yang lebih tinggi memiliki peluang hampir 20 kali lebih besar untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Adapun variabel SIZE memiliki nilai signifikansi pada angka 0,058 yang berada sedikit di atas batas atas 5%. Meskipun secara statistik tidak signifikan, nilai ini masih menunjukkan kecenderungan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan nilai Exp(B) sebesar 3,270, dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki peluang yang lebih tinggi dalam

menyajikan informasi keuangan yang berkualitas, diduga karena dukungan sumber daya yang lebih memadai.

Sementara itu, tiga variabel lainnya, yakni FINDEP (sig. = 0,663), EXPN (sig. = 0,792), dan STATUS (sig. = 0,523) menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga keberadaannya dalam model tidak mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan, proporsi belanja operasional, dan opini audit tidak secara langsung memengaruhi peluang pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dalam konteks model yang diuji.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik yang telah dilakukan, maka uraian pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel belanja modal mengindikasikan bahwa realisasi belanja modal di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengandung arti bahwa semakin tinggi alokasi dan pengelolaan belanja modal, semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik. Hasil ini menyatakan bahwa **H1 diterima**, artinya semakin besar proporsi belanja modal

terhadap total belanja daerah, maka peluang pemerintah daerah memperoleh opini WTP akan menjadi semakin besar pula. Temuan ini mendukung teori *stewardship*, bahwa pengelola (*steward*) memiliki kecenderungan niat untuk bertanggung jawab dan memaksimalkan manfaat untuk kepentingan publik (Donaldson & Davis, 1991).

Pernyataan ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Fadilah & Andriani (2025) yang menegaskan bahwa belanja modal yang efektif mencerminkan pengelolaan aset dan infrastruktur yang transparan dan akuntabel, sehingga berkontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Begitu pula Digdowiseiso et al. (2022) menyatakan bahwa investasi publik dalam bentuk aset tetap memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat sesuai SAP, yang mendorong opini audit yang lebih baik.

Namun demikian, pernyataan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rakhman & Wijayana (2019) serta Aurelia et al. (2024) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian mereka, belanja modal dianggap belum diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan aset yang memadai, sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap perolehan opini audit. Perbedaan hasil ini dimungkinkan karena perbedaan konteks wilayah, efektivitas pelaksanaan anggaran, atau tingkat kesiapan sistem pencatatan aset antar daerah.

4.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap ukuran pemerintah daerah (diukur dari total aset) dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah sehingga **H2 ditolak**. Meskipun pengaruhnya tidak terbukti signifikan secara statistik, temuan ini tetap memperlihatkan arah korelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan skala yang lebih besar memiliki kecenderungan lebih besar dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Kecenderungan ini dapat dijelaskan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal dan administratif yang lebih besar memiliki kemampuan untuk merekrut tenaga akuntansi yang kompeten, membangun sistem pengendalian internal yang kuat, serta mengadopsi teknologi informasi yang menunjang proses pelaporan keuangan. Dukungan sumber daya ini memungkinkan proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan sesuai standar pengelolaan keuangan daerah. Studi yang dilakukan oleh Digidowiseiso et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian Firmansyah,

Arfiansyah, et al. (2022) juga mendukung pernyataan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap peluang untuk mendapatkan opini WTP. Namun dalam konteks penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya pengaruh yang signifikan ukuran pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

4.3.3 Pengaruh Kemandirian daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil pengujian terhadap Kemandirian Daerah (FINDEP) terhadap kualitas laporan keuangan dapat dinyatakan bahwa **H3 ditolak**, yang berarti tidak terdapat bukti statistik yang menunjukkan pengaruh signifikan kemandirian daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Aurelia et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan dari dana transfer sehingga pelaksanaan kegiatan akan tertunda dan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Selain itu, Penelitian Purnamawati & Hatane (2020) juga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan banyak pemerintah daerah yang meskipun memiliki PAD yang besar, belum tentu memiliki sistem akuntansi yang andal, SDM yang kompeten, serta pengawasan internal yang memadai.

Dalam konteks penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, hasil ini dapat dijelaskan oleh data bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini menyebabkan kemandirian fiskal tidak menjadi faktor dominan dalam mendorong kualitas pelaporan keuangan. Beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah bahkan menunjukkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah dibandingkan total pendapatan daerah.

Selain itu, meskipun ada daerah yang memiliki PAD relatif tinggi seperti Kota Semarang atau Kabupaten Kudus, belum sepenuhnya disertai dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kuantitas PAD belum mencerminkan kualitas tata kelola keuangan, terutama bila tidak didukung oleh sistem akuntansi yang handal, SDM yang profesional, serta pengawasan internal yang kuat melalui Inspektorat Daerah.

4.3.4 Pengaruh Status Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian variabel Status Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan dapat dinyatakan bahwa **hipotesis H4 ditolak**. Tidak terdapat bukti statistik yang menunjukkan bahwa status daerah sebagai kota berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dibandingkan kabupaten. Meskipun nilai koefisien positif menunjukkan bahwa arah hubungan daerah kota cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas, namun karena hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, maka arah efek ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menarik kesimpulan yang kuat secara ilmiah.

Temuan penelitian ini belum konsisten dengan hasil yang diungkapkan oleh Aurelia et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemerintah kota cenderung memiliki infrastruktur birokrasi dan sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan pemerintah kabupaten, sehingga berpotensi menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Namun dalam konteks pemerintah daerah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa perbedaan status administratif belum tentu menjadi faktor pembeda yang signifikan.

Salah satu kemungkinan penyebab ketidaksignifikanan ini adalah adanya standar pelaporan keuangan yang seragam bagi seluruh pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, sebagaimana diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020. Hal ini membuat kualitas laporan keuangan lebih bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pengawasan internal, bukan pada status administratif semata.

Selain itu, faktor lain seperti kapabilitas aparatur pengelola keuangan, kualitas pengawasan oleh APIP, serta komitmen pimpinan daerah terhadap transparansi keuangan bisa jadi lebih berpengaruh dibandingkan status kota atau kabupaten. Oleh karena itu, meskipun daerah kota mungkin memiliki keunggulan

dari sisi infrastruktur dan akses teknologi, hal tersebut belum cukup untuk secara signifikan membedakan kualitas pelaporan keuangannya dari daerah kabupaten.

4.3.5 Pengaruh Pengalaman Kepala Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil pengujian terhadap variabel pengalaman kepala daerah (EXPN) menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk mendukung hipotesis bahwa pengalaman kepala daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah sehingga **H5 ditolak**.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berlawanan arah dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Aurelia et al. (2024), yang menyatakan bahwa semakin berpengalaman seorang kepala daerah, semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengarahkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih akuntabel dan transparan. Namun, hasil penelitian ini justru mengindikasikan bahwa lamanya masa jabatan belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kemungkinan penyebab hasil ini adalah bahwa pengalaman jabatan belum tentu disertai dengan peningkatan kualitas kepemimpinan atau kompetensi teknis dalam bidang keuangan. Beberapa kepala daerah yang telah menjabat lama mungkin lebih fokus pada aspek politik atau pembangunan fisik, dibandingkan pada pembenahan sistem pelaporan dan transparansi keuangan.

Selain itu, kualitas pelaporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan teknis dari aparat birokrasi, sistem pengendalian internal, serta kualitas SDM di OPD teknis, yang lebih berperan langsung dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan kepala daerah sendiri. Oleh karena itu, pengalaman kepala daerah secara individual belum cukup menjadi faktor penentu kualitas pelaporan, terutama tanpa dukungan sistem kelembagaan yang kuat.

4.3.6 Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil regresi logistik, Kapabilitas APIP terbukti berkontribusi secara **positif dan signifikan** dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah sehingga **hipotesis H6 diterima**. Arah koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan kapabilitas APIP secara substansial meningkatkan probabilitas pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin tinggi level kapabilitas APIP, maka semakin besar peluang laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan predikat opini audit yang lebih baik. Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Hasil yang diperoleh dalam studi ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anto & Yusran (2023) yang menemukan bahwa peningkatan kapabilitas auditor internal berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan intern dan kualitas pengelolaan

keuangan daerah. APIP yang kompeten dapat mendeteksi potensi kesalahan atau penyimpangan sejak dini, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini juga diperkuat oleh Purnamawati & Hatane (2020) yang mengungkapkan bahwa auditor internal memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian intern, dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh dari 35 pemerintah daerah yang terdiri dari kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah selama periode 2015 s.d. 2023, penelitian ini menghasilkan sejumlah simpulan penting yang dirumuskan sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah dan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

1. **Belanja Modal** berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin besar realisasi belanja modal yang dikelola secara akuntabel, semakin tinggi pula kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini audit WTP.
2. **Ukuran Pemerintah Daerah** tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh ukuran dapat bersifat kontekstual, tergantung pada karakteristik daerah, kebijakan internal, serta efektivitas pengelolaan keuangan publik di masing-masing wilayah.
3. **Kemandirian Fiskal** tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah belum tentu mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan berkualitas.

4. **Status Pemerintah Daerah** (kabupaten atau kota) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Studi ini mengindikasikan bahwa perbedaan administratif antara kabupaten dan kota tidak menjadi penentu dalam pencapaian opini audit terhadap laporan keuangan.
5. **Pengalaman Kepala Daerah** tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa lamanya masa jabatan kepala daerah tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan.
6. **Kapabilitas APIP** mengindikasikan bahwa peningkatan Kapabilitas APIP berkontribusi secara positif serta signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Tingkat kapabilitas APIP yang semakin tinggi menunjukkan peluang yang lebih besar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku.

5.2 Implikasi

1. Teoritis

Hasil studi ini memperkaya pemahaman mengenai determinan pelaporan keuangan sektor publik dengan pendekatan empiris yang berbasis pada teori stewardship. Temuan ini juga memperluas ruang lingkup kajian akuntabilitas publik dengan mempertimbangkan faktor-faktor struktural dan individu secara bersamaan.

2. Praktis

- a) Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perencanaan dan pelaksanaan belanja modal agar lebih efisien dan sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan.
- b) Optimalisasi PAD dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat menjadi penting dalam membangun kemandirian fiskal yang berdampak pada transparansi pelaporan.
- c) Pengembangan kapasitas pengawasan internal melalui peningkatan kompetensi APIP perlu diakselerasi untuk menjamin kepatuhan dan integritas dalam pelaporan keuangan.
- d) Pengalaman kepala daerah sebaiknya dijadikan salah satu kriteria dalam evaluasi kebijakan tata kelola keuangan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki beberapa limitasi yang penting untuk dicermati dalam proses penafsiran hasil penelitian. Kendala utama yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi adalah tidak meratanya distribusi opini audit pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah. Data penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2023 memperoleh opini WTP. Kondisi ini menyebabkan variabel dependen dalam penelitian menjadi terpusat, sehingga mengurangi kemampuan model regresi logistik ordinal dalam membedakan secara efektif antara kelompok yang memperoleh opini WTP dan non-WTP. Dominasi opini WTP juga membatasi kemampuan analisis untuk

menguji secara mendalam kontribusi variabel-variabel independen terhadap variasi kualitas pelaporan. Meskipun pendekatan statistik telah disesuaikan untuk mengatasi kondisi tersebut, temuan dalam penelitian ini tetap perlu dipahami dalam konteks keterbatasan data yang kurang seimbang tersebut.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini, khususnya terkait dominasi opini WTP pada sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah, maka agenda penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi ke daerah lain yang memiliki distribusi opini audit yang lebih beragam. Hal ini penting untuk meningkatkan variasi data dan memungkinkan model analisis mengidentifikasi pengaruh determinan secara lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan *multinomial logistic regression* apabila kategori opini audit lebih dari dua dan sebaran data memungkinkan, agar hasil estimasi menjadi lebih informatif.

Penelitian ke depan juga diharapkan dapat mengintegrasikan variabel-variabel tambahan yang mencerminkan aspek kelembagaan dan proses, seperti sistem informasi akuntansi, kualitas SDM bidang keuangan, serta peran legislatif dalam pengawasan anggaran. Di samping itu, pendekatan dengan menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika penyusunan laporan keuangan di tingkat daerah. Dengan pengembangan tersebut, penelitian

lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih mendalam dalam rangka memperkuat akuntabilitas keuangan sektor publik di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Determinants of The Quality of Financial Reports. In *International Journal of Professional Business Review* (Vol. 8, Issue 3). AOS-Estrategia and Inovacao. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331>
- Aurelia, C., Nurmawanti, P., Afifah, U., & Setiawan, D. (2024). Determinants of Financial Reporting Quality: Evidence from Local Governments in Sumatera Island. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 175–190. <https://doi.org/10.24815/jdab.v11i1.31788>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2023/II>.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2022). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2019-2021. In <https://jateng.bps.go.id/id/publication/2022/12/12/9b1bba837c9e0fce49132b78/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-dan-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-2019-2021.html>.
- BPKP. (2021). *Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021*.
- Digdownseiso, K., Subiyanto, B., & Lubis, R. F. (2022). Analisis Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Keuangan Non Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. https://www.researchgate.net/publication/246481910_The_Iron_Cage_Revisited_Institutional_Isomorphism_and_Collective_Rationality_in_Organizational_Fields.
- Djamil Nasrullah. (2023). Factors affecting the Quality of Financial Reports: A Value Relevance Based Analysis. *Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(1), 01–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10695247>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fadilah, A. F., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23, 179–198.

- Fajri, N., & Ritonga, I. T. (2019). Analisis Hubungan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan. *ABIS: Accounting and Business Information System Journal*, 7.
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Rizal Yuniar, M. (2022). LOCAL GOVERNMENTS FINANCIAL REPORTING QUALITY IN PAPUA AND WEST PAPUA: DO LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS MATTER? *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 139–147. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA: TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAN KARAKATERISTIK PEMERINTAH DAERAH. In *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* (Vol. 4, Issue 2). www.djpk.kemenkeu.go.id,
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Hafsari, P. (2020). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/23660>.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). *Multivariate Data Analysis, 5th ed.* (5th ed.). Englewood Cliffs, NJ.
- Hariani, S., & Fakhroazi, A. (2021). *DETERMINANTS OF FINANCIAL REPORTING QUALITY: AN EMPIRICAL STUDY AMONG LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA*. <https://Sobiad.Org/Manuscript/Index.Php/Ijefs/Article/View/753/75>.
- Hosmer, D. W. ., Lemeshow, Stanley., & Sturdivant, R. X. . (2013). *Applied logistic regression*. Wiley.
- Karaeng, S., & Oktaviani, A. R. (2023). Pengaruh Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)*, 2, 326–338. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jpmi/article/view/4063/2299>
- Kurniati, Sylvia, & Abdullah. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan terhdap Kuntabilitas Pelaporan Keuangan. *GBJ Gendhera Buana Jurnal*, 2, No 1, 15–29.
- Maggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024, December 1). *ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL*. <https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jmd/Article/View/3701>.

- Matsunaga, S. R., & Yeung, E. (2011). Evidence on the Impact of a CEO's Financial Experience on the Quality of the Firm's Financial Reports and Disclosures. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1014097>
- Patria, R., & Sasmita, H. (2021). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT BPK TERHADAP UNDERSTANDABILITY DALAM KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *MODUS*, 33(1), 98–119.
- Peraturan Kepala BPKP, Pub. L. No. 4, Badan Pengawasan dan Pembangunan RI (2016).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019> (2019).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Purnamawati, I. G. A., & Hatane, S. E. (2020). Analysis of Local Government Financial Information Quality Based on Internal and External Factors. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 11(2), 66. <https://doi.org/10.26740/jaj.v11n2.p66-81>
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2019, September). *Determinants of Financial Reporting Quality in the Public Sector: Evidence from Indonesia*. https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_id=3396365.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (10th ed.). CV Alfabeta.
- Taek, G. M. (2019). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Periode Anggaran 2012-2017*. Akuntansi Sektor Publik.
- Toyyib, M. (2023, May 10). *Upaya Menilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil/Ntt/Id/Data-Publikasi/Artikel/2883-Upaya-Menilai-Kualitas-Pengelolaan-Kuangan-Daerah.Html>.
- Utami, S. R., & Sulardi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Daerah, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 19, Issue 2). www.jab.fe.uns.ac.id
- UU No. 23 Tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (2014).

Wurangian, C. H., & Sannie, K. S. (2025). *Tinjauan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 s.d. 2024*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/data-publikasi/berita-terbaru/3360-tinjauan-kemandirian-keuangan-daerah-kabupaten-kepulauan-talaud-tahun-2022-s-d-2024.html>

